

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan karakteristik kemaritiman yang tercatat pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Sebagai negara maritim, Indonesia berpengaruh sebagai jalur lalu lintas perdagangan pelayaran global dengan 40% pelayaran dunia yang melintasi Indonesia (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2018). Sumber daya maritim menjadi komoditas unggulan Pemerintah Indonesia yang kemudian dirumuskan pada Nawa Cita (sembilan visi Kabinet Indonesia Kerja) di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Salah satu hambatan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia adalah isu keamanan wilayah kelautan. Wilayah Indonesia kerap menghadapi ancaman dari kelompok kriminal jaringan internasional, salah satunya yaitu kelompok terorisme jihadis salafi Abu Sayyaf yang beroperasi di wilayah Selat Sulu. Pemerintah Indonesia mencatat jika kelompok Abu Sayyaf telah melakukan penyanderaan kepada WNI sejak tahun 2004 (Nainggolan, 2016). Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 Pemerintah Indonesia telah mencatat setidaknya lebih dari 30 WNI yang pernah menjadi sandera dari kelompok teror tersebut (BBC Indonesia, 2019).

*Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)* mencatat puncak operasi kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Selat Sulu di tahun 2016 sebanyak 16 kasus penculikan

awak kapal. Serangan ini tidak hanya mengancam keamanan maritim tetapi juga mengganggu perdagangan internasional di jalur strategis tersebut (Rustam et al, 2022). Keberadaan Abu Sayyaf didukung oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dan dukungan lokal di komunitas marginal. Kelompok ini beroperasi di wilayah terpencil seperti kepulauan Sulu dan Basilan, yang memberikan perlindungan alami bagi mereka. Selain itu, struktur kelompok yang terpecah menjadi faksi-faksi kecil membuat mereka sulit diberantas secara menyeluruh (Hart, 2017).

Tidak hanya menyangkut Indonesia saja, kelompok Abu Sayyaf juga mengancam wilayah perairan Malaysia dan Filipina. Dari kasus sebelumnya yang telah dialami oleh WNI, Malaysia kerap menjadi wilayah terjadinya penyanderaan. Pada 26 Maret 2016 Kelompok Abu Sayyaf membajak kapal Brahma 12 dan Anand 12 yang membawa 7.000 ton batu bara dari Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan di perairan Malaysia antara Sabah dan Kepulauan Sulu. Kelompok Abu Sayyaf telah menyandera sepuluh ABK (Anak Buah Kapal) asal Indonesia dengan menuntut uang tebusan sebesar lima puluh juta Peso (Khasanah et al, 2021). Kejadian ini terus berlanjut dan dialami oleh WNI di wilayah perairan Malaysia. Hal tersebut menghasilkan kecaman keras dari Pemerintah Indonesia yang dilayangkan kepada Pemerintah Malaysia untuk turut serta menjaga keamanan wilayah perairannya (CNN Indonesia, 2020). Di Filipina kelompok Abu Sayyaf tidak hanya melakukan aksinya pada wilayah perairan saja, kelompok ini dikenal sebagai kelompok separatis Pemerintah Filipina dengan kerap menyebarkan teror melalui penculikan, pengeboman, pembunuhan, maupun pemenggalan (BBC

Indonesia, 2016). Meningkatnya ancaman perompakan dan, penyanderaan, mendorong tiga negara untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas perairan. Berdasarkan fakta tersebut timbulah satu urgensi keamanan wilayah perairan kawasan di perairan Selat Sulu.

Fenomena pembajakan kapal oleh kelompok Abu Sayyaf menjadi faktor utama pendorong kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di sektor keamanan maritim. Pemerintah Indonesia menginisiasi kerja sama trilateral *joint patrol* (patroli gabungan) bersama Malaysia dan Filipina di wilayah perairan Selat Sulu. Tidak hanya sebagai upaya menghentikan aktivitas terorisme di perairan kawasan, kerja sama ini juga dibentuk untuk menjaga pelayaran kapal tongkang batubara dan menjaga lalu lintas pelayaran dagang internasional yang melintasi Selat Sulu (Dirgantara et al, 2020). Pada 5 Mei 2016 Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina untuk membahas masalah sama yang tengah dialami hingga tercetuskannya *Joint Declaration* yang diikuti dengan perjanjian keamanan perairan berupa: 1) Dilaksanakannya patroli bersama oleh tiga negara di wilayah perairan Selat Sulu; 2) *Quick Response* sebagai mekanisme komunikasi langsung antar negara untuk menanggapi ancaman yang ditemukan saat patroli berlangsung; 3) pembentukan *National Focal Point* sebagai representasi dari masing-masing negara untuk berkoordinasi dan berkomunikasi satu sama lain; 4) Dan menciptakan saluran komunikasi antara tiga negara (Rahmat & Rusdiyanta, 2021). Pada 26 Mei 2016 diadakan pembahasan lanjutan mengenai *Joint Declaration* pada agenda

ASEAN *Defence Minister Meeting* di Laos, yang selanjutnya menambahkan tujuh poin *Joint Statement* dari *Joint Declaration* yaitu: 1) Patroli laut yang terkoordinir; 2) Pembentukan pos komando militer yang dilengkapi dengan alat dan saluran komunikasi pada kapal patroli; 3) Patroli udara di wilayah perairan Sulu; 4) Menyetujui wilayah patroli melalui pembentukan *Trilateral Maritime Patrol Working Group* (TMPWG); 5) Membentuk pos dan rute transit; 6) Koordinasi hasil pemantauan wilayah melalui pertukaran informasi intelijen; 7) Berbagi informasi melalui sistem basis data menjadi inti dari mekanisme kerja sama trilateral (Ibid). Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut disepakati *Trilateral Cooperative Agreement* yang ditandai dengan terbentuknya *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) pada 19 Juni 2017. Kerja sama ini akan berfokus pada kegiatan pelatihan militer gabungan, patroli laut yang terkoordinir, dan *port visit* (Chaer et al, 2021). Tiga bulan setelah kerja sama trilateral INDOMALPHI terbentuk, instrumen udara ditambahkan sebagai penguatan patroli maritim pada 13 Oktober 2017. (Abdulrahim & Kuntjara, 2018).

Sejak terbentuknya kerja sama trilateral INDOMALPHI di tahun 2017, kerja sama ini telah melewati berbagai fenomena dan perkembangan hingga pertemuan rapat ke-24 di bulan Mei tahun 2024. Di tahun terbentuknya kerja sama trilateral maritime patrol, ketiga negara telah melakukan tujuh aksi, dengan tiga aksi simulasi dan empat aksi langsung (Atamimi & Azzqy, 2020). Setelah beroperasi selama setahun, keamanan Selat Sulu menunjukkan penurunan tingkat ancaman. Hal ini ditunjukkan dengan hanya dua kali aksi penanganan langsung dan satu kali aksi percobaan (Ibid). Pada kurun waktu tahun 2017-2024, *port visit* telah

terlaksana sebanyak enam kali di Indonesia. *Port visit* tersebut berfokus pada kegiatan latihan pasukan gabungan, penguatan internal pasukan, dan forum pembahasan masalah Selat Sulu (Chaer et.al, 2021).

Latihan gabungan pasukan tiga negara juga dilakukan selain pada kegiatan *port visit*. INDOMALPHI telah melakukan kegiatan latihan bersama (Latma) di wilayah daratan sebanyak dua kali. Latma pertama kali yang bertempat di PT Pindad Divisi Munisi, Turen, Kabupaten Malang diadakan pada 11-14 Desember 2018 dengan fokus Subject Matter Expert Exchange (SMEE) *on Sniper Trilateral Land Exercise*. Latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pasukan tiga negara dalam penggunaan senapan *sniper* melalui metode *table top exercise* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018). Pelaksanaan Latma kedua diadakan pada 29 Juli – 8 Agustus 2019 yang bertempat di Lapangan Sapta Marga Yonif Raider 613/RJA Tarakan Kalimantan Utara. Latihan ini mengusung tujuan interoperabilitas tiga negara untuk menangani aksi terorisme dan kejahatan trans nasional di kawasan Selat Sulu. Latihan ini berfokus pada kegiatan pelatihan tembak, simulasi pertempuran, simulasi patroli keamanan, dan materi evakuasi (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019).

Pelaksanaan kerja sama INDOMALPHI menunjukkan adanya unsur *middle power* diplomacy berdasarkan faktor identitas kewilayahan dan tujuan pembentukan kerja sama. Definisi dari *middle power* diplomacy adalah aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara dengan tingkat kekuatan menengah yang memiliki pengaruh dalam panggung politik internasional tanpa berlandaskan pada kekuatan militer saja, melainkan dengan berfokus kepada

aktivitas persuasi dan rekonsiliasi pada satu isu global yang menghasilkan reputasi positif dari negara yang berpartisipasi (Yamasaki, 2009).

Tinjauan pustaka pada penelitian ini mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi diplomasi Indonesia dalam kerja sama INDOMALPHI, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dilengkapi dalam penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan adalah artikel berjudul “Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerja Sama *Trilateral Cooperative Arrangement (Port visit INDOMALPHI 2017-2019)*” dalam Jurnal Diplomasi Pertahanan Volume VII (Chaer et al, 2021). Artikel ini membahas bagaimana diplomasi pertahanan diterapkan dalam kerja sama *Port visit INDOMALPHI* sebagai respons terhadap kejahatan transnasional yang mengancam keamanan jalur pelayaran internasional. Fokus utama artikel ini adalah pada penguatan kapasitas militer, peningkatan patroli laut, dan pertukaran informasi intelijen antara tiga negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa kerja sama INDOMALPHI berhasil menekan aktivitas kejahatan di Selat Sulu serta memperkuat posisi strategis Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara. Namun, artikel ini tidak menyoroti bagaimana *middle power* diplomacy digunakan sebagai strategi utama dalam kerja sama ini. Pendekatan multilateralisme regional sebagai instrumen diplomasi negara menengah juga belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran Indonesia sebagai *middle power* dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama trilateral.

Penelitian kedua yang relevan adalah artikel “*Strategy for Securing*

*Indonesia's Border Sea Area in the Sulu Sea Through Trilateral Maritime Patrol* INDOMALPHI” dalam Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Volume IV (Aliyah et al, 2024). Artikel ini membahas strategi keamanan yang diterapkan oleh Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di Selat Sulu. Fokus utama pada artikel ini adalah upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sektor kemaritiman melalui sektor militer dan kerjasama internasional. Pada artikel ini, INDOMALPHI menjadi wadah kerjasama regional pada sektor militer laut sebagai instrumen penjagaan wilayah dan penjagaan keamanan dari masing-masing negara. Penulis berupaya melengkapi kesenjangan materi pada artikel ini, dengan mendeskripsikan tahapan integrasi tiga negara menurut perspektif regional multilateralisme. Penulis juga akan melengkapi implementasi *middle power* diplomacy, efektivitas kerja sama trilateral, relevansi dengan visi Poros Maritim Dunia, dan pentingnya multilateralisme dalam pengelolaan keamanan maritim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah strategi pertahanan dalam INDOMALPHI tetapi juga mengkaji diplomasi *middle power* dan multilateralisme sebagai instrumen penting dalam pengelolaan keamanan regional maritim.

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang aktivitas diplomasi *middle power* Indonesia adalah artikel yang berjudul “Diplomasi *Middle-Power* Indonesia di Masa Pandemi” dalam jurnal Indonesian Perspective Volume VI (Triwibowo & Martha, 2021). Artikel ini membahas strategi diplomasi *middle power* Indonesia selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Indonesia melakukan diplomasi *middle power* dengan berfokus kepada tiga aspek, yaitu:

perlindungan warga negara, solidaritas global, dan kerja sama ekonomi. Karakteristik diplomasi *middle power* Indonesia pada tahun 2020 cenderung menunjukkan pola kerjasama multilateral global yang mengedepankan aspek *good international citizenship*. Pada kawasan Asia Tenggara, implementasi diplomasi *middle power* Indonesia dilakukan dengan membentuk ASEAN Coordinating Council (ACC). Multilaterisme global Indonesia melakukan kerjasama dengan Cina, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Terdapat kesenjangan pembahasan pada penelitian ini, penelitian ini tidak membahas tentang upaya diplomasi *middle power* pertahanan yang masih berjalan di tahun 2020. Aktivitas *Middle power* diplomacy Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks krisis kesehatan. Keberlanjutan kerja sama ini juga mencerminkan peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sesuai dengan visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Indonesia, sebagai *middle power*, mengimplementasikan strategi diplomasi *middle power* dalam kerja sama INDOMALPHI guna mencapai stabilitas keamanan maritim di kawasan. Keberlangsungan patroli INDOMALPHI menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan. Hal ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia mencakup berbagai aspek termasuk keamanan maritim, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran Indonesia sebagai kekuatan menengah di kawasan. Penulis berupaya melengkapi kesenjangan tersebut dengan membahas peran Indonesia sebagai kekuatan menengah yang aktif dan responsif terhadap tantangan global dan regional melalui diplomasi *middle power*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh penulis dalam mengkaji *middle power* diplomacy Indonesia untuk mendukung keamanan wilayah laut di perairan Selat Sulu sebagai berikut: “Bagaimana implementasi *middle power* diplomacy Indonesia dalam kerja sama INDOMALPHI untuk mewujudkan stabilitas keamanan wilayah Selat Sulu?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengkaji implementasi *middle power* diplomacy Pemerintah Indonesia sebagai upaya mewujudkan stabilitas keamanan wilayah Selat Sulu.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 *Middle power* Diplomacy**

*Middle power* diplomacy atau diplomasi negara menengah adalah salah satu metode diplomasi kontemporer yang umum dilakukan setelah berakhirnya perang dingin. *Middle power* diplomacy diartikan sebagai upaya penyebaran pengaruh dan langkah inisiatif pada panggung politik internasional melalui kerja sama antar negara menengah tanpa kekuatan nasional yang substansial (Cox, 1989). Aspek yang mendasari konsep *middle power diplomacy* adalah indeks peringkat kemampuan relatif negara di dunia dalam menentukan pola dan arah kebijakan luar negeri dari negara menengah (Kirton, 2006).

Kerja sama negara menengah didorong melalui strategi *middlepowermanship* yang memanfaatkan kapabilitas negara menengah di sistem politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional (Cox, 1989). *Middlepowermanship* terbentuk dari norma *good international citizenship*, yaitu upaya penyelesaian masalah bersama secara kolektif melalui kerja sama multilateral (Cooper, 1997).

Adapun tiga pendekatan dasar untuk mengidentifikasi pelaksanaan *middle power* diplomacy menurut Chapnick (1999). Pendekatan fungsional (*functional approach*) mengukur negara sebagai *middle power* berdasarkan kemampuan dan kontribusi fungsionalnya dalam isu tertentu. Pengaruh negara *middle power* pada pendekatan ini didasarkan pada keterlibatan, kepentingan, dan kemampuan untuk berkontribusi pada situasi yang dihadapi. Pendekatan perilaku (*behavior approach*) menggolongkan negara sebagai *middle power* berdasarkan kecenderungan perilaku tertentu dalam aktivitas luar negerinya, seperti multilateralisme, kompromi dalam sengketa, dan pelaksanaan *good international citizenship*. Pendekatan hierarki (*hierarchical approach*) menggolongkan negara sebagai *middle power* berdasarkan posisi relatifnya dalam hierarki kekuatan internasional (Chapnick, 1999).

Kerjasama oleh negara menengah diupayakan untuk mencapai keterlibatan yang relatif besar, meski kekuatan nasional negara-negara tersebut tergolong di skala kecil maupun sedang (Cooper, 1997). Pernyataan Cooper kian didukung oleh Moeini (2022) yang menyatakan bahwa *middle power diplomacy* ditentukan oleh kapasitas dan keinginan negara menengah untuk menegaskan kepentingan mereka terhadap ancaman yang terjadi pada lingkup geopolitik

(Moeini et al, 2022). Berdasarkan pernyataan Moeini, faktor geopolitik mendorong negara menengah untuk membentuk kerja sama secara kooperatif (*cooperative arrangement*). Dalam konteks keamanan, aktivitas *middle power diplomacy* didorong oleh ketergantungan negara-negara menengah terhadap kekuatan keamanan geografis wilayah (Buzan & Waever, 2003). Hal ini mendorong negara menengah untuk membentuk hubungan timbal balik.

Diplomasi *middle power* dapat dilakukan jika ada isu global yang mengancam negara menengah, seperti isu terorisme, kesehatan, pangan, dan ekonomi. Isu ini mendorong hubungan negara menengah dengan berfokus kepada pengurangan dan pencegahan konflik (Jordaan, 2003). Pelaksanaan *middle power diplomacy* cenderung menghasilkan pola kerja sama dinamis yang ditentukan dari isu spesifik dari masing-masing negara menengah. Kerja sama ini ditandai dengan kerja sama ataupun penyatuan yang bersifat *ad hoc* (situasional) (Yamasaki, 2009).

Adapun tiga instrumen dari pelaksanaan *middle power diplomacy* menurut Jordaan (2003). Instrumen pertama diplomasi *middle power* dilakukan melalui forum dan institusi internasional untuk mencapai kepentingan nasional melalui aktivitas multilateral (*multilateralisme*). Seperti mengangkat isu permasalahan dalam forum internasional dan menyepakati kerja sama kooperatif oleh tiga negara atau lebih. Instrumen kedua diplomasi *middle power* melalui upaya negara menengah melalui kerja sama *niche* dengan mengusung kerja sama berdasarkan isu spesifik untuk mengatasi masalah secara signifikan. Melalui kerja sama *niche* pada manajemen konflik internasional, negara menengah mampu membangun identitas

independen tanpa bergantung kepada negara maju untuk menyelesaikan masalah. Instrumen ketiga diplomasi *middle power* negara menengah yang sedang berkembang (*emerging middle powers*) kerap memiliki orientasi regionalisme melalui penggunaan institusi atau rezim regional untuk mendukung upaya integrasi wilayah, dan sebagai upaya mengamankan stabilitas kawasan yang rentan (Jordaan, 2003).

#### **1.4.2 Diplomasi Maritim**

Diplomasi maritim merupakan praktik politik internasional yang menggunakan optimalisasi sektor maritim sebagai alat pengelolaan hubungan strategis pada politik internasional (Mière, 2014). Ludiro Madu (2018) memiliki pengertian yang serupa dengan Miere (2014). Madu mengartikan diplomasi maritim sebagai aktivitas negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan kedaulatan laut, serta kolaborasi sektor maritim dan pertahanan secara bilateral maupun multilateral (Madu, 2018). Menurut Miere (2014), praktik diplomasi maritim digunakan sebagai upaya pencegahan dan penanganan konflik dan alat perumusan hukum internasional. Miere membagi diplomasi maritim menjadi tiga jenis yaitu diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif.

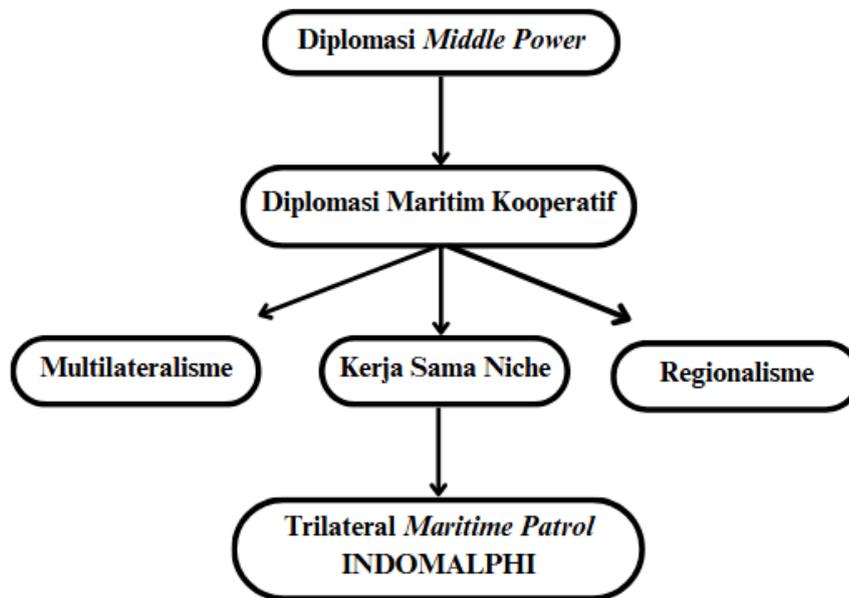
Diplomasi maritim kooperatif terjalin oleh tujuan negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan kemaritiman secara kolektif dan kooperatif melalui penggunaan *soft power*. Diplomasi ini dijalankan melalui kolaborasi kerjasama multilateral yang ditandai disepakatinya pengaturan kooperatif untuk kegiatan kolaborasi seperti operasi gabungan, latihan bersama, dan kunjungan pelabuhan.

Umumnya diplomasi maritim kooperatif dijalankan untuk fokus menghasilkan kepercayaan oleh negara yang tergabung dalam kerja sama maritim berdasarkan tujuan bersama secara spesifik (Setiawan & Zaman, 2020). Tujuan spesifik ini kerap ditandai dengan diterapkannya pengaturan kerja sama *niche* secara kooperatif berdasarkan tujuan tertentu. Seperti pada konteks *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* yang menekankan diplomasi maritim kooperatif melalui kerja sama secara konkret dan inklusif (Hutomo, et al., 2023). Diplomasi maritim kooperatif juga bisa dilaksanakan melalui regionalisme, seperti pada *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus Expert's Working Group on Maritime Security (ADMM-Plus EWG on Maritime Security)* sebagai katalisator negara anggota dalam upaya pengembangan kemampuan pencegahan ancaman laut pada wilayah regional (Soplanit & Effendi, 2023).

Diplomasi maritim persuasif atau kebijakan *showing the flag*, terjalin oleh kepentingan negara-negara maritim untuk meningkatkan citra militer dan sumber daya maritimnya di politik internasional (Nisa, 2020). Praktik diplomasi maritim persuasif umumnya terlihat pada bendera negara yang ditempatkan pada alutsista maritim. Diplomasi maritim koersif atau *gunboat policy* dijalankan sebagai reaksi terhadap ancaman kedaulatan negara. diplomasi ini menggunakan kekerasan dan ancaman seperti penembakan, dan penyerangan oleh angkatan laut dengan tujuan memblokir pergerakan musuh. (Rahim & Burhanuddin, 2024). Adapun instrumen yang digunakan pada diplomasi maritim koersif menurut Perez (2015) yaitu, penggunaan ultimatum untuk mengancam kejahatan laut seperti pembajakan, dan terorisme (Perez, 2015).

## 1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 1 Sintesa pemikiran



Sumber: Penulis

Dalam penyelesaian masalah keamanan wilayah, negara menengah menggunakan pendekatan diplomasi *middle power* untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pendekatan diplomasi *middle power* dilakukan melalui pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif yang bersifat kolektif ditandai dengan pengaturan kerja sama (*cooperative arrangement*). Adapun tiga instrumen diplomasi maritim kolektif melalui pendekatan diplomasi *middle power* yaitu melalui forum multilateral, kerja sama *niche*, dan pembentukan institusi regional. Dalam penelitian ini, aktivitas *middle power* diplomacy negara menengah terjalin melalui aktivitas multilateral, yang mendorong kerja sama *niche trilateral maritime patrol*. Kerja sama *niche* sebagai kerja sama yang terbentuk berdasarkan isu spesifik akan membentuk pola kerja sama secara kooperatif. Melalui pendekatan ini, Indonesia,

Malaysia dan Filipina menyepakati kerja sama *niche* trilateral *maritime patrol* yang terbentuk melalui aktivitas multilateral.

## **1.6 Argumen Utama**

Untuk mengatasi ancaman kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Selat Sulu, Indonesia mengedepankan pendekatan *middle power* diplomacy melalui pelaksanaan diplomasi maritim kolektif. Diplomasi maritim kolektif Indonesia dijalankan melalui instrumen multilateralisme dan kerja sama *niche*. Indonesia menggunakan instrumen multilateralisme melalui pendekatan *middle power* diplomacy dengan membawa isu keamanan Selat Sulu dan mendorong kerja sama trilateral *maritime patrol* pada *ASEAN Defences Ministry Meeting*. Instrumen kerja sama *niche* pada pendekatan *middle power* diplomacy dijalankan melalui pelaksanaan diplomasi maritim kooperatif yang menyepakati patroli gabungan, pelatihan militer bersama, dan komunikasi antar tiga negara.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif sebagai pisau analisis terhadap implementasi *middle power* diplomacy Indonesia pada kerja sama INDOMALPHI yang mampu menjaga wilayah perairan Selat Sulu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberi interpretasi terhadap sebuah fenomena secara mendetail, yang menghasilkan jawaban berupa tipologi atau berbagai pola pada fenomena yang sedang dikaji (Priyono, 2016). Adapun dua tujuan dari tipe penelitian deskriptif menurut Priyono (2016) yaitu: 1) menggambarkan dan

menafsirkan proses terjadinya sebuah fenomena; 2) menciptakan klasifikasi atau pola yang mempengaruhi sebuah fenomena.

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian jenis ini menggunakan pendekatan melalui analisis studi kasus (Sugiyono, 2017). Secara terminologis penelitian kualitatif adalah penguraian frasa yang menafsirkan premis, hipotesis, dan latar belakang masalah dari sebuah fenomena (Abdussamad, 2021). Berasal dari kata “kualitas” sehingga penelitian ini mengacu kepada aspek empirik yang mempengaruhi pola perilaku dari kehidupan manusia (Abdussamad, 2021). Sebagai metode penelitian yang bersifat *naturalistic inquiry*, manusia adalah instrumen utama pada penelitian ini. Sehingga peneliti pada penelitian sebelumnya memerlukan pemahaman holistik dan adaptif terhadap fenomena yang sedang dikaji.

Adapun ciri dari penelitian kualitatif sebagai berikut: 1) berdasar dari analisa non kuantitatif; 2) kualitas yang menjurus pada aspek alamiah dan bertentangan dengan kuantitas; 3) tidak mengandung unsur perhitungan (Abdussamad, 2021).

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk eksplorasi lebih mendalam mengenai dinamika diplomasi *middle power* serta faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan kerja sama trilateral. Dengan metode ini, peneliti mampu mengidentifikasi pola kerja sama yang telah berjalan.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Berdasarkan isu yang dikaji pada penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder dengan rentang waktu tahun 2017-2024. Penulis menggunakan rentang waktu tersebut dengan menyesuaikan linimasa fenomena dan kegiatan kerja sama INDOMALPHI.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai metode utama teknik pengumpulan data, melalui tinjauan literatur. Data sekunder adalah data mentah yang dihimpun oleh peneliti sebelumnya, dan terdapat data tersier sekunder yang diartikan sebagai data yang telah diolah oleh peneliti lain (Sugiyono, 2017). Data sekunder berasal dari sumber yang memuat data dari subjek analisa yang akan dikaji. Data sekunder biasanya diwujudkan seperti dokumen dan literatur (ibid). Data sekunder merujuk pada penelitian terdahulu yang dipublikasikan sebelumnya oleh berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun data secara mendalam dan komprehensif mengenai implementasi diplomasi *middle power* Indonesia dalam kerja sama INDOMALPHI sebagai upaya mewujudkan keamanan wilayah.

Penulis juga menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data. Observasi adalah teknik menghimpun data yang bersifat spesifik, teknik ini mampu mengkaji pemaknaan dan menginterpretasikan sebuah fenomena tertentu, seperti halnya kajian terhadap tingkah laku verbal maupun non verbal (Sugiyono, 2017). Yusuf (2013) menyatakan jika keberhasilan metode observasi dalam menghimpun

data ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Sebab peneliti mengamati objek penelitian dan memaknai serta menginterpretasikan sebuah hubungan sebab-akibat antara satu aspek variabel dengan variabel lain yang masih berkorelasi dengan objek penelitiannya (Yusuf, 2013).

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Dalam analisa penulis terhadap studi kasus, penulis menggunakan teknik *literature review* sebagai teknik analisis data. *Literature review* adalah elemen kunci dalam penelitian ilmiah yang memberikan landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, membantu dalam pemilihan metode penelitian, dan memeriksa validitas sumber informasi. *Literature review* pada penelitian ilmiah adalah sebagai komponen yang fundamental, hal ini melibatkan penyelidikan, evaluasi, dan sintesis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang hendak dikaji. *Literature review* membantu mengidentifikasi kerangka teoritis yang telah ada, membantu memahami perkembangan teori, dan mengevaluasi relevansi teori dalam konteks penelitian (Booth, 2016). Dengan begitu, penulis mampu memahami latar belakang penelitian dan merancang kerangka konseptual yang relevan dengan subjek penelitian.

Penulis dapat mempelajari metode-metode penelitian yang digunakan dalam studi sebelumnya dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan melalui metode tersebut. Aspek ini membantu peneliti dalam merancang pendekatan penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Selain

memberikan landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, dan membantu pemilihan metode penelitian.

#### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini akan mencakup sub-bab sebagai bentuk penjelasan deskriptif terhadap objek analisisnya. Pada bab pembahasan akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan status quo, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang membahas teori *middle power* diplomacy, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian yang berisikan tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II yang akan menjelaskan proses terbentuknya kerja sama trilateral *maritime patrol* melalui instrumen multilateralisme dalam diplomasi maritim kooperatif.

Bab III yang akan menjelaskan proses terbentuknya kerja sama trilateral *maritime patrol* melalui instrumen kerja sama *niche* dalam diplomasi maritim kooperatif. Pada bab ini juga akan menjelaskan praktik pelaksanaan pelatihan militer gabungan, patroli laut yang terkoordinasi, dan *port visit*.

Bab IV berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian ini, dan saran penulis terhadap penelitian selanjutnya.